

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Teknologi sistem informasi telah berkembang sangat pesat dan signifikan sekarang ini. Teknologi sistem informasi dapat dimanfaatkan oleh siapapun dari individu, kelompok, organisasi, dan bahkan instansi. Pemanfaatan teknologi sistem informasi dalam instansi pemerintahan salah satunya adalah tentang pemberitaan, pelayanan dan transparansi. Contoh tansparansi di insatansi pemerintahan adalah tentang tingkat kemiskinan yang terjadi di Kota Bandung. Letak geografis wilayah Kota Bandung berada di dataran tinggi dengan luas wilayah 167,31 km² dan terdiri dari 151 kelurahan dari 30 kecamatan. Dengan jumlah penduduk di Kota Bandung pada tahun 2018 sebesar 2,5 juta jiwa dengan rincian 1,26 juta jiwa laki-laki dan 1,24 juta jiwa perempuan serta 1,81 juta jiwa merupakan kelompok usia produktif (15-64 tahun).

Kemiskinan merupakan musuh bagi pemerintah pusat maupun pemerintah daerah selama bertahun-tahun. Luasnya wilayah dan kepadatan jumlah penduduk di Kota Bandung membuat potensi ketimpangan ekonomi yang terjadi semakin besar. Persebaran penduduk di Kota Bandung sendiri tergolong tidak rata, data yang diperoleh dari BPS menyatakan bahwa sebesar 5,98% warga Kota Bandung berada di Kecamatan Babakan Ciparay dengan persentase kepadatan penduduk 20,05 ribu jiwa per km², sedangkan di Kecamatan Bojong Kaler menyentuh angka kepadatan penduduk sebesar 40,35 ribu jiwa per km². Hasil survey dari BPS Kota Bandung pada tahun 2014 menunjukkan persentase kemiskinan di Kota Bandung sebesar 4,65% atau 115000 jiwa, pada tahun dan pada tahun 2018 angka kemiskinan di Kota Bandung sebesar 89380 jiwa atau 3,57%. Dari tahun 2014 sampai dengan 2018 persentase dan jumlah penduduk miskin mengalami penurunan 0,04% pada tahun 2015, 0,29% di tahun 2016, 0,15 di tahun 2017, dan 0.6% di tahun 2018. Hal tersebut merupakan berita yang positif, akan tetapi angka yang tertera masih terkategori cukup banyak.

Mengingat penyebaran penduduk yang tidak merata di setiap kecamatannya, dibuktikan dari data sebaran kemiskinan berdasarkan kelurahan pada

tahun 2016 menunjukkan rata-rata tiap kelurahannya terdapat 776 kepala keluarga yang masuk ke dalam kategori miskin dengan Kelurahan Jamika menjadi kelurahan yang mempunyai kepala keluarga yang tergolong miskin tertinggi sebesar 4437 dan Kelurahan Citarum menjadi yang paling sedikit dengan 25 kepala keluarga. Berdasarkan data yang telah direkapitulasi pada Lampiran A Data Kemiskinan menunjukkan hasil pengurutan dari data sebaran kemiskinan menunjukkan ada 3 kecamatan yaitu Kecamatan Bojong Kaler, Babakan Ciparay, dan Buah Batu yang termasuk dalam 5 besar sebaran kemiskinan menurut kelurahan pada tahun 2016. Pengelompokan tingkat ekonomi di Indonesia dibagi menjadi 10 desil atau kelompok sepersepuluh, dengan desil 1 (sangat miskin) rumah tangga dalam 10% terendah, desil 2 (miskin) rumah tangga dalam kelompok 10%-20% kelompok terendah, desil 3 (hampir miskin) kelompok 20%-30%, desil 4 (rentan miskin) kelompok 30%-40%. Pemerintah Kota Bandung menargetkan pada tahun 2023 tingkat kemiskinan turun menjadi 3,14% [1], dengan cara yang sudah diatur pada Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 05 Tahun 2015 pasal 7 ayat 3 huruf b tentang pengalokasian anggaran untuk penyelenggaraan kesejahteraan sosial dalam APBD dan huruf e tentang pemberian bantuan sosial sebagai stimulan kepada masyarakat. Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandung dapat diketahui bahwa sumber dana bantuan sosial didapatkan dari APBD Kota Bandung yang akan disalurkan kepada tiap kepala keluarga sesuai kriteria tingkat kemiskinannya.

Dinas sosial dan penganggulangan kemiskinan (dinsosnangkis) Kota Bandung memiliki visi untuk membebaskan masyarakat Kota Bandung dari masalah kesejahteraan sosial. Dinsosnangkis Kota Bandung beralamatkan di Jl. Babakan Karet (Belakang Rusunawa Rancacili) Kel. Derwati Kec. Rancasari Kota Bandung. Hasil wawancara yang dilakukan kepada bapak Zain Iskandar sebagai kepala seksi perlindungan dan jaminan sosial mengenai alur proses dari penentuan penerima bantuan tetap yaitu Bantuan Pangan Non Tunai (BNPT) dan Program Keluarga Harapan (PKH) adalah dengan cara pendataan melalui form yang diberikan ke setiap warga di kecamatan masing-masing melalui RT, RW, dan kelurahan yang ada lalu data yang sudah diterima dinsosnangkis akan dikirimkan ke Kementerian Sosial (Kemensos) untuk melakukan persetujuan penyaluran bantuan. Hasil wawancara selanjutnya kepada bapak Judin Ijaludin, S.sos. sebagai kepala seksi

pengendalian menyatakan bahwa penentuan sebuah anggota keluarga (kepala keluarga) masuk ke dalam kategori desil 1/2/3/4 sepenuhnya hak dari kemensos tanpa ada pemberitahuan bagaimana mengklasifikasikannya padahal beberapa data yang diterima oleh dinsosnangkis tidaklah lengkap tetapi data tersebut tetap dilaporkan kepada kemensos. Pada halaman berita kompas menyatakan masih adanya kasus penyaluran bantuan sosial yang tidak tepat sasaran, pada halaman tersebut dijelaskan karena permasalahan data dan pihak yang terlibat cukup banyak [2]. Pada dinsosnangkis pun pernah mengalami kekeliruan dalam proses penyaluran bansos. Pada saat pandemi covid dinsosnangkis mengalami kesulitan untuk menentukan daerah yang akan menerima bantuan sosial dikarenakan banyaknya keluarga yang mengalami kemiskinan secara mendadak, bahkan hasil wawancara dengan bapak Judin dinsosnangkis hampir melakukan kesalahan penyaluran bansos kepada kecamatan yang sudah menerima bansos. Pada beberapa penelitian sebelumnya pun memiliki kesamaan masalah yaitu belum adanya visualisasi data wilayah yang memadai untuk memantau daerah dengan angka kemiskinan tinggi, sehingga dapat memperlambat dan kurang akurat untuk pengolahan dan pengambilan keputusan dalam rangka pengentasan kemiskinan dengan menyalurkan bantuan sosial secara tepat sasaran [3] [4] [5]. Dan dari penelitian sebelumnya sepakat untuk memanfaatkan teknologi sistem informasi geografis untuk memvisualisasikan data wilayah. Penggunaan sistem informasi geografis berguna untuk memvisualisasikan daerah miskin dengan tingkat kemiskinan tiap daerah. Dengan adanya visualisasi data maka user (pengambil keputusan / bagian penganggulungan kemiskinan) dapat mengambil keputusan dengan pembandingan keputusan yang sudah direkomendasikan oleh sistem yang akan dibangun.

Berdasarkan masalah yang terjadi di Kota Bandung tentang angka kemiskinan yang tinggi, maka penulis mengusulkan solusi untuk membangun sebuah aplikasi dengan memanfaatkan teknologi informasi geografis. Penulis akan melakukan penelitian yang berjudul “PENENTUAN WILAYAH PENYALURAN BANTUAN SOSIAL DI KOTA BANDUNG DENGAN PENDEKATAN SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS”.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang, maka dapat diidentifikasi masalah yang ada yaitu dinsos mengalami kesulitan dalam menentukan daerah yang direkomendasikan untuk menerima bantuan dan monitoring daerah yang sudah menerima bantuan.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penelitian ini adalah untuk membangun sebuah aplikasi dengan memanfaatkan teknologi sistem informasi geografis. Sedangkan tujuan dibangunnya aplikasi ini adalah membantu dinsos dalam menentukan daerah yang akan menerima bantuan dan memonitoring sebaran daerah yang sudah menerima bantuan sosial.

1.4 Batasan Masalah

Batasan masalah merupakan pembatasan terhadap penelitian yang diakibatkan oleh keterbatasan waktu, biaya, ataupun kemampuan yang dimiliki peneliti untuk menghindari kesalahan dalam penelitian ini. Sehingga sistem informasi yang akan dibangun sesuai dengan yang diharapkan. Adapun batasan-batasan masalah yang ada di dalam penelitian ini meliputi:

1. Sumber data didapatkan dari situs resmi Badan Pusat Statistika Kota Bandung (bandungkota.bps.go.id) dan dinas sosial penganggulangan kemiskinan ([dinsosnangkis](http://dinsosnangkis.kota.bandung)) kota bandung.
2. Data spasial yang digunakan berupa wilayah Kota Bandung dengan mengambil 5 urutan terbesar sebaan kemiskinan menurut tiap kelurahan dan didapatkan 3 kecamatan yaitu Kecamatan Bojongloa Kaler, Babakan Ciparay, Buah Batu. Dengan data atribut id kecamatan, nama kecamatan, jumlah kepala keluarga beserta kondisi keluarga.
3. Menggunakan data sebaran kemiskinan berdasarkan kecamatan dan tingkatan kemiskinan kota bandung tahun 2016
4. Metode yang digunakan memberikan rekomendasi keluarga miskin yang menerima bantuan adalah *weight product*.
5. Sistem dibangun untuk dinsosnangkis sebagai bantuan rekomendasi keluarga miskin sebelum dilaporkan kepada kemensos.

6. Model analisis sistem yang digunakan adalah terstruktur, dengan tools yang digunakan yaitu ERD, Diagram konteks, dan DFD
7. Sistem yang akan dibangun berbasis WEB dengan menggunakan bahasa HTML, CSS, PHP. Serta menggunakan MySql Sebagai DBMS..

1.5 Metodologi Penelitian

Metodologi penelitian merupakan suatu proses yang digunakan untuk memecahkan suatu masalah yang logis, dimana memerlukan data-data untuk mendukung terlaksananya suatu penelitian. Metodologi penelitian yang digunakan adalah metode analisis deskriptif. Metode analisi deskriptif merupakan metode yang menggambarkan fakta-fakta dan informasi dalam situasi atau kejadian sekarang. Metode penelitian ini memiliki dua tahapan, yaitu tahap pengumpulan data dan tahap pembangunan perangkat lunak.

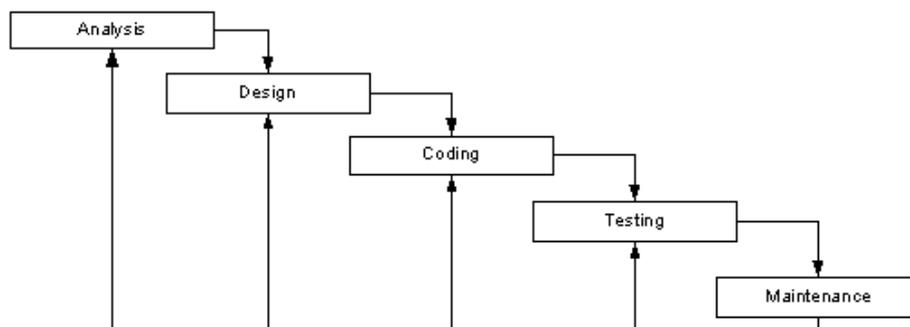
1.5.1 Metodologi Penelitian

Metode pengumpulan data diperoleh secara langsung dari objek penelitian. Tahapan pengumpulan data yang digunakan yaitu studi literatur.

Studi ini dilakukan dengan cara mempelajari, meneliti dan menelaah berbagai literature-literatur dari perpustakaan dan internet yang bersumber dari buku, teks, jurnal dan bacaan-bacaan lainnya yang ada kaitannya dengan topik penelitian.

1.5.2 Metodologi Penelitian

Metode yang digunakan dalam pembuatan perangkat lunak menggunakan model waterfall yang meliputi beberapa proses aktivitas-aktivitas yang dapat dilihat pada gambar 1.1



Gambar 1.1 Metode pengembangan perangkat lunak

1. Analysis, adalah tahap menganalisis hal-hal yang diperlukan dalam pelaksanaan pembuatan perangkat lunak agar sesuai dengan kebutuhan.
2. Design, adalah proses menterjemahkan kebutuhan ke dalam sebuah representasi software yang dapat diperkirakan demi kualitas sebelum memulai pemunculan kode sehingga dapat dimengerti.
3. Coding, adalah tahap menterjemahkan data yang telah dirancang kedalam bahasa pemrograman tertentu.
4. Testing, adalah proses pengujian terhadap perangkat lunak yang telah dibangun. Apakah perangkat lunak tersebut berfungsi dengan baik sesuai yang diharapkan atau tidak.
5. Maintenance, adalah tahap dimana suatu perangkat lunak yang sudah selesai dapat mengalami perubahan-perubahan atau penambahan fitur sesuai dengan permintaan user

1.6 **Sistematika Penulisan**

Sebagai acuan bagi penulis agar penulisan skripsi ini dapat terarah dan tersusun sesuai dengan yang penulis harapkan, maka akan disusun sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB 1 PENDAHULUAN

Pada bab ini berisi uraian latar belakang masalah, identifikasi masalah, maksud dan tujuan, batasan masalah, metodologi penelitian, tahap pengumpulan data, model pengembangan perangkat lunak dan sistematika penulisan.

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini akan membahas berbagai konsep konsep dasar dan teori-teori pendukung yang berhubungan dengan pembangunan sistem.

BAB 3 ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM

Pada bab ini akan membahas analisis kebutuhan sistem dan pengguna, diantaranya yaitu analisis masalah, analisis prosedur yang sedang berjalan, analisis basis data, analisis kebutuhan fungsional, dan perancangan sistem yang dimulai dari perancangan data, perancangan menu, dan perancangan antarmuka program (interface).

BAB 4 IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN SISTEM

Pada bab ini berisi hasil implementasi analisi dari BAB 3 dan perancangan aplikasi yang dilakukan, serta hasil pengujian aplikasi untuk mengetahui apakah aplikasi yang dibangun sudah memenuhi kebutuhan.

BAB 5 KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bab ini berisi kesimpulan yang diperoleh dari hasil pengujian sistem, serta saran untuk pengembangan aplikasi yang telah dirancang.

